



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONO ANTONI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 844857

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **775.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/108 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 394.000.000
2. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 1.719 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KEPAHANG, HASIL SENDIRI Rp. 101.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **135.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 54P (CAST WHEEL) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



3. MOBIL, DAIHATSU M602RS-MT/MINIBUS Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	316.416.975
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.226.416.975
III. HUTANG	Rp.	100.139.521
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.126.277.454

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.